

**FAKTOR-FAKTOR INFLASI DAN PENANGGULANGANNYA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

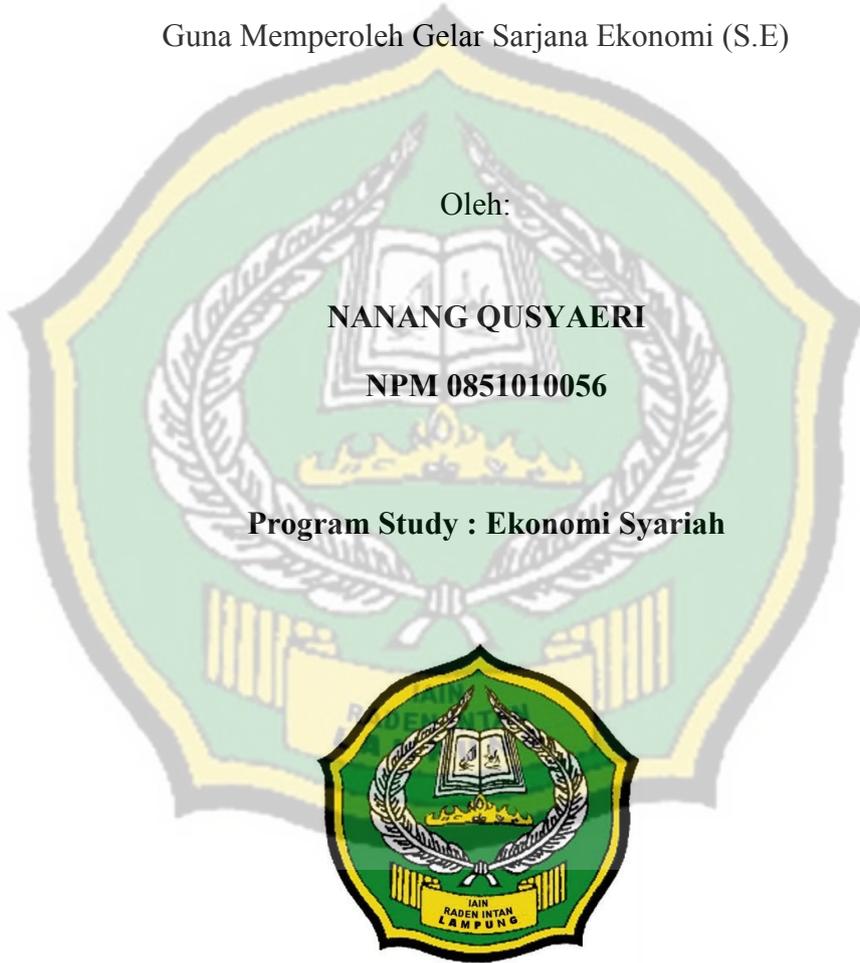
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NANANG QUSYAERI**

**NPM 0851010056**

**Program Study : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1437 H / 2017 M**

**FAKTOR-FAKTOR INFLASI DAN PENANGGULANGANNYA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NANANG QUSYAERI**

**NPM 0851010056**

**Program Study : Ekonomi Syariah**

**PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H.,M.A**

**PEMBIMBING II : Mardhiyah Hayati, SP., M.S.I**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1437 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, hal ini mempengaruhi perekonomian negara secara makro maupun mikro, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan berdampak secara massif terhadap stabilitas ekonomi. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang penting dan sering dijumpai hampir di semua negara. Inflasi menimbulkan katrol harga dan subsidi pada bahan pokok makanan dan bahan penting lainnya untuk dikonsumsi

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai: apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi? apa pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia khususnya dan bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam penanggulangan inflasi yang terjadi di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui dua sudut pandang teori ekonomi yang berbeda, baik menurut teori ekonomi konvensional (Sosial-Kapitalis), maupun ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab inflasi yang terjadi di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang disebabkan oleh inflasi terhadap perekonomian Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*), proses penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan untuk mencari berbagai teori yang sedang dikaji dengan menelusuri literatur yang ada baik dari buku, majalah, koran, artikel, situs dan lain sebagainya serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan penanggulangan inflasi menurut konsep ekonomi islam.

Berdasarkan hasil penelitian, Teori ekonomi konvensional menyatakan bahwa faktor penyebab inflasi dapat terjadi adalah karena kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Sedangkan menurut teori ekonomi Islam, inflasi terjadi karena dua sebab yaitu *natural inflation* (faktor alamiah penyebab inflasi), seperti akibat bencana, musim paceklik karena gagal panen dan lainnya. Juga karena faktor *Human Error Inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab kesalahan manusia itu sendiri (Korupsi, administrasi yang buruk, kekacauan politik). Dampak yang ditimbulkan amatlah buruk, inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang dan Memperburuk distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan. yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR INFLASI  
 DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF  
 EKONOMI ISLAM**

Nama : **NANANG OUSYAERI**

NPM : **0851010056**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**



**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 02 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. Suharto, S.H.M.A**  
 NIP. 195802011986031002

  
**Mardiyah Hayati, SP., M.S.I**  
 NIP. 197605292008012010

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

  
**Madnasir, S.E. M.Si**

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul "FAKTOR-FAKTOR INFLASI DAN PENANGGULANGANNYA  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", disusun oleh Nama: Nanang Ousyaeri,  
NPM. 0851010056, Jurusan Ekonomi Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, pada Hari/tanggal :**

**Jum'at/ 02 Desember 2016**



**Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H**

**Sekretaris : Heni Verawati, Mq.A**

**Penguji I : Madnasir, S.E., M.S.I**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A**

**Dekan,**



**Dr. Moh. Bahruddin, M.A**  
**NIP. 195808241989031003**

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ﴿٣﴾  
(الطلاق: ٢-٣)

“...Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya,. Dan dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka...”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Bandung, 2007 Hal : 558

## HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Orang tuaku yang tercinta “Ayahanda M.Suudi” dan “Ibunda Sariyah” yang dengan tulus telah memberikan doa, dan bimbingan.
  2. Adik-adikku tersayang Novidah Ahyaini dan si Jagoan Rezik El Bai Riki dan untuk wanita masa depanku, Putri Danisa S.Pd, yang tak henti-henti memberikan dukungannya.
  3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari’ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
  4. Segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
  1. Almamater IAIN Raden Intan Lampung yang menjadi kebanggaanku
- Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amiin*
- Wassalammu’alaikum Wr. Wb.*

Penulis,

Nanang Qusyaeri  
NPM 0851010056

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanang Qusyaeri  
Tempat tanggal lahir : Wayharong, 28 Agustus 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Suka Aman Rt/ 28 Rw/12 Desa Wayharong Kec.  
Waylima

Kab. Pesawaran Lampung

### Pendidikan Formal

- a. Tahun 1996-2002 : Sekolah Dasar Negeri 5 Wayharong
- b. Tahun 2002-2005 : MtsN 2 Pesawaran
- c. Tahun 2005-2008 : MA Al-Fatah Natar
- d. Tahun 2008 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Pada Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis  
Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Raden  
Intan Lampung

### Pengalaman Organisasi

- a. Tahun 2008 : Penulis tercatat pernah aktif di UKM Pergerakan  
Mahasiswa  
Islam Indonesia

### PENGALAMAN KERJA

- a. Tahun 2013 - 2014 : di PT Columbia
- b. Tahun 2014 - 2015 : di PT Sinarmas
- c. Tahun 2015 - Sekarang : di LPSDM Bhakti Nusa Cendikia (BNC).

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR INFLASI DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I), jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulisan dan penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak amat diharapkan.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya akan kemampuan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta motivasi semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

2. Bapak Dr. H. Moh Mukri, M. Ag. selaku Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

4. Bapak Madnasir, S.E., M.Si., dan Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa memotifasi dan memberikan dukungan bagi kami
5. Bapak Prof. Dr.H. Suharto, S.H., M.A. selaku Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih atas waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
6. Ibu Mardiyah Hayati, SP., M.S.I. selaku Pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengarahan dan bimbingannya.
7. Semua Staff, Dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
8. Rekan – rekan yang telah banyak menyumbangkan pemikiran hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis,

Nanang Qusyaeri  
NPM 0851010056

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Pembatasan Masalah .....	12
E. Fokus Masalah .....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM EKONOMI ISLAM TENTANG INFLASI</b>	
A. Pengertian Inflasi .....	20
B. Dasar Hukum Dalam Mengatasi Inflasi .....	22
C. Penyebab Inflasi .....	24
D. Jenis-Jenis Inflasi .....	32
E. Inflasi Yang Pernah Terjadi di Indonesia .....	40
F. Dampak Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	45
G. Kebijakan-Kebijakan Dalam Mengatasi Inflasi .....	48

**BAB III TINJAUAN UMUM EKONOMI KONVENSIONAL TENTANG  
INFLASI**

A. Penyebab Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional .....	59
B. Jenis-Jenis Inflasi .....	67
C. Dampak Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional .....	68
D. Kebijakan-Kebijakan Dalam Mengatasi Inflasi .....	72

**BAB IV ANALISIS DATA**

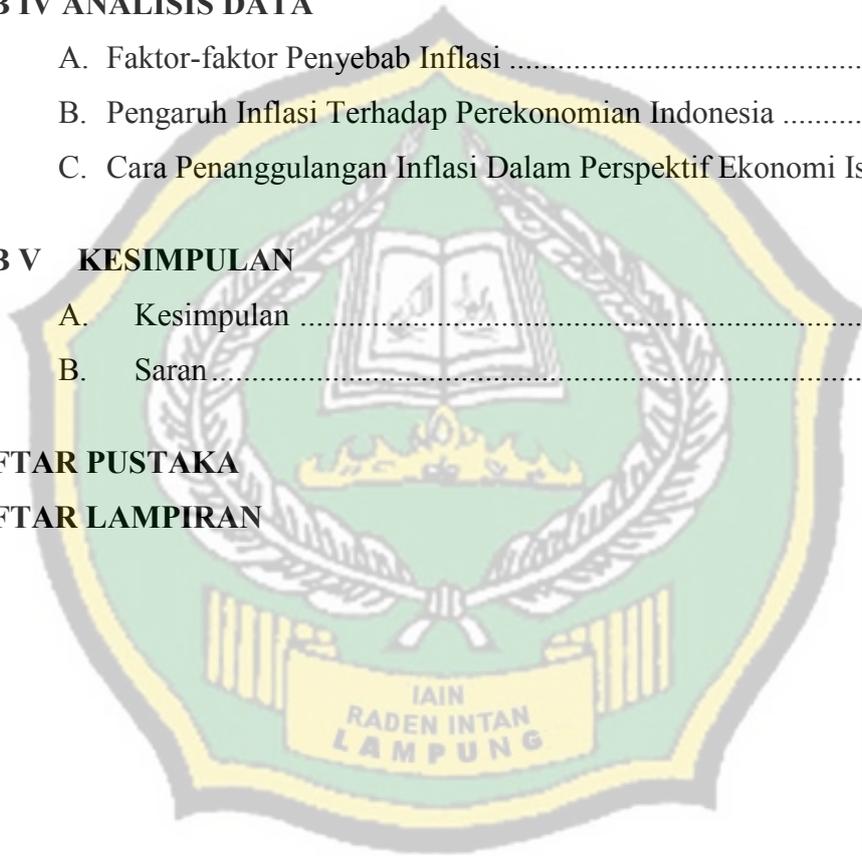
A. Faktor-faktor Penyebab Inflasi .....	76
B. Pengaruh Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia .....	83
C. Cara Penanggulangan Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	86

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Data IHK dan Inflasi periode tahun 2011 s/d 2015.....	8
<b>Tabel 11</b>	Tingkat Inflasi Indonesia Periode Tahun 1998.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I Inflasi Dorongan Biaya .....	35
Gambar II Inflasi Dorongan Permintaan .....	36



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan guna memperoleh gambaran tentang pengertian judul "Faktor-Faktor Inflasi dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah kata yang terdapat dalam judul ini. Kata-kata yang perlu mendapat penjelasan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. **Faktor**

Faktor diartikan sebagai keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>2</sup>

#### 2. **Inflasi**

Definisi dari inflasi adalah sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.<sup>3</sup> Menurut yang lain inflasi adalah gejala kenaikan barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus<sup>4</sup>, sedangkan menurut pendapat lainnya, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibanding dengan penawaran barang di pasar.<sup>5</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah terjadinya kenaikan harga umum barang dan jasa secara terus menerus.

---

<sup>2</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Pers,2009), hlm.129

<sup>3</sup> Nurul Huda. Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.175

<sup>4</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: FE UI, 2004 ) Edisi Kedua hlm. 25

<sup>5</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.333

### 3. Penanggulangan

Kata penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara atau perbuatan menanggulangi.<sup>6</sup>

### 4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjabaran arti kata-kata tersebut maka pengertian judul yang dimaksud oleh penulis adalah metode yang digunakan dalam Sistem Ekonomi Islam untuk menanggulangi atau meminimalisir inflasi, khususnya yang terjadi di Indonesia.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Objektif

Penulis ingin mengetahui aplikasi konsep Ekonomi Islam yang berkaitan dengan penyebab, dampak dan cara menanggulangi inflasi.

### 2. Subjektif

Ketersediaan referensi yang cukup maka penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini.

---

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Op.cit.*, hlm. 1585

<sup>7</sup> Prof. Mannan dan M. Abdul, dkk., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 10

### C. Latar Belakang Masalah

Kata inflasi merupakan kata yang umum dalam ruang lingkup perekonomian. Bagi masyarakat awam, hal ini selalu mengandung konotasi negatif, pendapat ini tidak sepenuhnya benar namun tidak pula sepenuhnya salah. Karena terdapat dua sisi dalam inflasi, dampak negatif akan terjadi bilamana angka inflasi telah melewati batas wajar, hal sebaliknya (dampak positif) akan terjadi bilamana angka inflasi tersebut masih dalam batasan wajar.

Dalam sejarah, pada zaman Rasulullah SAW. pun beliau pernah mengalami inflasi yang sangat meresahkan, dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan yaitu :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “ Orang-orang berkata : wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman pun dalam darah dan harta “. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan).<sup>8</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia juga pernah mengalami beberapa kali problem inflasi, baik pada masa beberapa saat setelah kemerdekaan, pada masa penjajahan jepang dan juga pada tahun 1998 dimana saat itu Indonesia tengah

<sup>8</sup> <http://www.mutiarahadist.com>. Diakses pada 25 November pukul 10.00 WIB

dilanda *chaos* setelah proses suksesi kepemimpinan dari orde baru ke orde reformasi. pasca reformasi pada kuartal pertama tahun 2015 hingga bulan September, pemerintah sempat dihadapkan pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, hal ini menyebabkan kekhawatiran terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998. Oleh karena itu pemerintah segera melakukan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut.

Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan jika hal itu terjadi secara terus menerus, maka kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan tetap. Misalnya, sebelum terjadinya inflasi uang sebesar Rp. 1.000.000,- dapat digunakan biaya hidup selama satu minggu, tetapi setelah terjadi inflasi uang sebesar itu hanya dapat digunakan untuk hidup selama lima hari. Jadi dengan jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadi inflasi. Oleh karena itu, pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, karena inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum.

Dalam ekonomi Islam penyebab inflasi dibagi dalam dua sebab besar yaitu: *natural inflation*, jenis inflasi ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, contohnya akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, karena terjadinya panceklik, perang, ataupun embargo dan *boycott*. *Human Error*

*Inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia, contohnya korupsi dan administrasi yang buruk.<sup>9</sup>

Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang penting dan sering dijumpai hampir di semua negara. Inflasi menimbulkan katrol harga dan subsidi pada bahan pokok makanan dan bahan penting lainnya untuk dikonsumsi.<sup>10</sup>

Inflasi merupakan suatu keadaan yang bisa dialami oleh setiap negara yang menganut sistem ekonomi Kapitalis maupun sistem ekonomi Sosialis. Dimana Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme adalah kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Setiap individu akan memperoleh barang kebutuhan menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai suatu tatanan ekonomi yang ketat diberlakukan disiplin politik yang tegas dan keras. Negara mengambil alih semua aktivitas ekonomi dan kebebasan ekonomi dihapuskan sama sekali.<sup>11</sup>

Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Tiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonominya

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 414

<sup>10</sup> Umerchakra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 166

<sup>11</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm.

menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya, persaingan bebas, selagi tidak melanggar norma-norma masyarakat dan tiap individu bebas mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaannya. Tiap individu bebas mengoptimalkan semua potensi ekonominya baik fisik, mental dan sumber daya lainnya menurut keinginannya. Terjadinya ketimpangan pada sistem ekonomi kapitalis adalah karena modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi.<sup>12</sup>

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut.<sup>13</sup> Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan prinsip-prinsipnya, di lain pihak.<sup>14</sup>

Sistem ekonomi merupakan kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat

---

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>14</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5

banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya.

Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi pilar system ekonomi Islam, yaitu :<sup>15</sup>

1. Kepemilikan,
2. Pengelolaan Harta,
3. Distribusi.

Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara.<sup>16</sup>

Suatu sistem ekonomi memiliki kebijakan tersendiri, termasuk kebijakan dalam menekan inflasi. Ekonomi konvensional mempunyai cara dalam menekan inflasi, demikian pula ekonomi Islam mempunyai cara, sistem, dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi. Seperti diketahui bahwa inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi

---

<sup>15</sup> Rahmat Sunnara, *Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), hlm. 3-9

<sup>16</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.

Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi salah satunya adalah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa sebagai indikator IHK telah dilakukan atas dasar survei biaya hidup (SBH) tahun 2007 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan pasar modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa di Indonesia.

Tabel 1.1  
Data IHK dan Inflasi periode tahun 2011 s/d 2015<sup>17</sup>

Bulan	2011		2012		2013		2014		2015	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	126,3	0,9	130,9	0,8	136,9	1,0	110,99 <sup>2)</sup>	1,1	118,7	-0,2
Februari	126,5	0,1	131,0	0,1	137,9	0,8	111,3	0,3	118,3	-0,4
Maret	126,1	-0,3	131,1	0,1	138,8	0,6	111,4	0,1	118,5	0,2
April	125,7	-0,3	131,3	0,2	138,6	-0,1	111,4	0,0	118,9	0,4
Mei	125,8	0,1	131,4	0,1	138,6	0,0	111,5	0,2	119,5	0,5
Juni	126,5	0,6	132,2	0,6	140,0	1,0	112,0	0,4	120,1	0,5
Juli	127,4	0,7	133,2	0,7	144,6	3,3	113,1	0,9	121,3	0,9
Agustus	128,5	0,9	134,4	1,0	146,3	1,1	113,6	0,5	121,7	0,4
September	128,9	0,3	134,5	0,0	145,7	-0,4	113,9	0,3	121,7	-0,1
Oktober	128,7	-0,1	134,7	0,2	145,9	0,1	114,4	0,5	121,6	-0,1
November	129,2	0,3	134,8	0,1	146,0	0,1	116,1	1,5	121,8	0,2
Desember	129,9	0,6	135,5	0,5	146,8	0,6	119,0	2,5	123,0	1,0
<b>Tingkat Inflasi</b>		<b>3,79</b>		<b>4,3</b>		<b>8,38</b>		<b>8,36</b>		<b>3,35</b>

Sumber : <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907>

<sup>17</sup> <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907> diakses 18 april 2016

Menurut Adiwarman Karim, secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.<sup>18</sup> Menurut Sadono Sukirno, inflasi yaitu sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.<sup>19</sup> Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan.

Inflasi dalam kenyataannya tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>19</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15

Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.<sup>20</sup>

Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.<sup>21</sup>

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain *self feeding inflation*

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*,(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176.

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Op.cit.*, hlm. 15

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*);
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*);

Adapun strategi untuk menekan inflasi yaitu *pertama*, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). *Kedua*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. *Ketiga*, penghapusan riba. Chapra mengatakan: “Elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan”.<sup>22</sup>

Penulis melihat permasalahan ini layak untuk diteliti karena paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator: pertama, penyebab inflasi; kedua, dampak atas terjadinya inflasi; ketiga, cara penanggulangan inflasi. Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: *Faktor-Faktor Inflasi dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bahwa pada karya ilmiah yang berjudul “Faktor-Faktor Inflasi dan Penanggulangannya Dalam

---

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 16

Perspektif Ekonomi Islam“ akan membahas penyebab serta cara penanggulangan inflasi menurut perspektif Islam, khususnya yang terjadi di Indonesia.

#### **E. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia ?
3. Bagaimanakah cara penanggulangan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam ?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi
- b. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia.
- c. Mengetahui cara penanggulangan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis adalah untuk menanbahkan khazanah intelektual kajian islam yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca dan informasi bagi penelitian yang lebih lanjut yang mempunyai minat besar dalam membedah permasalahan-permasalahan ekonomi, terutama dalam masalah penanggulangan inflasi.
- b. Secara praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengetahui tentang penanggulangan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.

## 3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya.”<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman yang substantif terhadap permasalahan penanggulangan inflasi menurut konsep ekonomi islam maka jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.1

Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran (kuantifikasi)

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrument pengumpul data, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarah pada penemuan teori, bersikap deskriptif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangannya bersifat sementara dan kesimpulan penelitian disepakati oleh peneliti dan subyek yang diteliti.

Dengan tujuan utama untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

## **1. Bentuk dan Sifat Penelitian**

### **a. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*), menurut Hermawan Warsito penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari kepustakaan.<sup>24</sup> Proses penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan untuk mencari berbagai teori

---

<sup>24</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

yang sedang dikaji dengan menelusuri literatur yang ada baik dari buku, majalah, koran, artikel, situs dan lain sebagainya serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan penanggulangan inflasi menurut konsep ekonomi islam.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif* yaitu “jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”.<sup>25</sup> Berbagai data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis terkait permasalahan dasar dan pandangan Ekonomi Islam dari harga dan saluran distribusi yang berpengaruh pada volume penjualan, sehingga penyelesaian penelitian ini dapat dipaparkan dan dijelaskan berupa kata-kata tertulis.

## 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.208

narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan – persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan – pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara.<sup>26</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.<sup>27</sup>

### 3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

---

<sup>26</sup> Husein Umar. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 56

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknis mencari data mengenai hal-hal yang tertulis. Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat atau majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dengan cara membaca dan mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>28</sup> Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah inflasi, dampak serta penanggulangannya dalam perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), hlm.78

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.<sup>29</sup> Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>30</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis *Deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>31</sup> Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.12

<sup>30</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.33

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 34

## BAB II

### TINJAUAN UMUM EKONOMI ISLAM TENTANG INFLASI

#### A. Pengertian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.<sup>32</sup>

Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena musiman menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya.<sup>33</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim, secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.<sup>34</sup>

Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu

---

<sup>32</sup>Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 155

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 155

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 135

sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum.<sup>35</sup> Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya), yang biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi.

## **B. Dasar Hukum Mengenai Kebijakan Dalam Mengatasi Inflasi**

Kata inflasi merupakan kata yang umum dalam ruang lingkup perekonomian. Bagi masyarakat awam, hal ini selalu mengandung konotasi

---

<sup>35</sup> Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 132

negatif, pendapat ini tidak sepenuhnya benar namun tidak pula sepenuhnya salah. Karena terdapat 2 sisi dalam inflasi, dampak negatif akan terjadi bilamana angka inflasi telah melewati batas wajar, hal sebaliknya (dampak positif) akan terjadi bilamana angka inflasi tersebut masih dalam batasan wajar.

Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang penting dan sering dijumpai hampir di semua negara. Inflasi menimbulkan katrol harga dan subsidi pada bahan pokok makanan dan bahan penting lainnya untuk dikonsumsi.<sup>36</sup> Bahkan pada zaman Rasulullah SAW. pun beliau pernah mengalami inflasi yang sangat meresahkan, dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan yaitu :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا  
السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ  
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي  
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

*“ Orang-orang berkata : wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman pun dalam darah dan harta “. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan).<sup>37</sup>*

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengantisipasi dampak negative dari kenaikan harga-harga, terutama berkenaan dengan barang atau

<sup>36</sup> Umerchakra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 166

<sup>37</sup> <http://www.mutiarahadist.com>. Diakses pada 25 Juni 2016 pukul 10.00 WIB

komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, maka pemerintah wajib melakukan langkah-langkah strategis guna menyasati inflasi tersebut, kebijakan fiscal perlu di lakukan, diantaranya dengan melakukan intervensi terhadap harga pasar guna menekan ketimpangan harga. Hal ini bererti bahwa, tidak selalu memandang dan meyakini harga pasar ditentukan oleh kekuasaan *invisible hand* ansich, dan bahwa harga akan menyesuaikan dengan sendirinya sesuai dengan hokum *supply and demand*.

Dalam penanggulangan inflasi digunakan 2 instrumen kebijakan yaitu fiskal dan moneter. Baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islammenggunakan instrumen ini, perbedaannya terletak pada dihilangkannya elemen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Hal ini dilakukan karena tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Q.S 30 : 39

### C. Penyebab Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Ekonom Islam Taqyudin Ahmad ibn al-Maqrizi 1364 M-1441 M, yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan penyebab inflasi dalam dua golongan, yaitu:

#### 1. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya ( dalam hal mencegah ). Ibn Al-Marizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD).<sup>39</sup> Maka *natural inflation* akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregat (AD). Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn Khattab r.a. pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya dari luar negeri membeli barang-barang yang mereka jual (*positie net exsport*). Adanya *positie net exsport* akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naiknya permintaan agregatif, atau grafik dilukiskan sebagai kurva AD yang

---

<sup>39</sup> Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal.169

bergeser ke kanan, akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan.

Khalifah Umar bin Khattab r.a melakukan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni Beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya permintaan agregatif (AD) dalam perekonomian setelah pelarangan tersebut maka tingkat harga kembali normal.

- b. Akibat dari turunnya tingkat produksi *agregatif supply (AS)* karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab yaitu pada saat paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, atau dapat digambarkan pada grafik kurva AS bergeser ke kiri, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Langkah yang ditempuh khalifah Umar bin Khattab r.a terhadap permasalahan tersebut yaitu Beliau melakukan impor gandum dari Fustat-Mesir sehingga penawaran agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.<sup>40</sup>

Ketika bencana alam terjadi berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan,

---

<sup>40</sup> Karim, Adiwarmanto Azwar *Ibid, hlm 169*

permintaan terhadap berbagai barang mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Akibatnya kegiatan ekonomi mengalami kemacetan bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, kematian. Keadaan ini memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar memperhatikan mereka. Untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan perbendaharaan negara menjadi berkurang secara drastic atau defisit anggaran.

Untuk menganalisisnya, dapat digunakan perangkat analisis konvensional yaitu persamaan identitas berikut:  $MV=PT=Y$ .

Dimana: M : Jumlah uang beredar

V : Kecepatan peredaran uang

P : Tingkat harga

T : Jumlah barang dan jasa

Y : Tingkat pendapatan nasional (GDP)

*Natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya  $T \downarrow$  sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya  $P \uparrow$ .
- b. Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya, nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan  $M \uparrow$  sehingga jika V dan T tetap maka  $P \uparrow$ .

Lebih lanjut, jika dianalisis dengan persamaan agregatif :

Dimana :  $AD = AS$

$$AS = Y$$

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

Serta :  $Y$  = pendapatan nasional

$C$  = konsumsi

$I$  = investasi

$G$  = pengeluaran pemerintah

$(X-M)$  = net export

Maka :  $Y = C + I + G + (X - M)$

Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab yang alamiah, atau murni karena tarikan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak perlu khawatir. Karena solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menstabilkan baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada kondisi semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.<sup>41</sup>

## 2. *Human Error Inflation*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *false inflation*. *Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut :

a. Korupsi dan administrasi yang buruk

---

<sup>41</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 180

Korupsi akan menaikkan tingkat harga, karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit, dimana hanya untuk pengurusan suatu ijin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan melakukan reformasi birokrasi.

Jika menggunakan pendekatan kepada permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS), maka korupsi dan administrasi yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Selain menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk.

Pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan, kondisi ini juga akan berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan finansial pribadi atau keluarga atau demi kemewahan hidup.

Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan Negara. Korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya siluman yang telah mereka keluarkan.

Dimasukkannya biaya siluman dalam biaya produksi (*cost of goods sold*) akan menaikkan total biaya produksi. ATC dan MC menjadi ATC<sub>2</sub> dan MC<sub>2</sub>. Sehingga harga jual menjadi naik dari P menjadi P<sub>2</sub>. Hal ini menjadi tidak merefleksikan nilai sumber daya sebenarnya yang digunakan dalam proses produksi. Harga yang terjadi terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada sehingga lebih lanjut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) pada akhirnya akan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Keadaan seperti inilah yang sebetulnya membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

Virus Korupsi dan buruknya administrasi ini mewabah mulai dari pejabat tinggi sebagai pemegang otoritas tertinggi sampai ke tingkat lurah/desa. Di mana-mana setiap berurusan dengan administrasi dan birokrasi selalu ada uang siluman. Keadaan inipun sampai ketingkat pedagang kecil, uang takut/keamanan yang dipungut preman jelas merugikan masyarakat.

b. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan

pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Jika dilihat lebih lanjut, pajak yang berlebihan mengakibatkan pada *efficiency* atau *loss dead weight loss*. Ini termasuk masalah pula dalam perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan ekonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>42</sup>

- c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*)

*Seignorage* arti tradisonalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh penguasa. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyak jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini berimplikasi pada penurunan nilai mata uang. Hal ini telah terbukti di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimana kebutuhan anggaran pemerintah dibiayai oleh pencetakan uang. Namun karena berlebihan hal ini menyebabkan terjadinya inflasi.<sup>43</sup>

Ketika terjadi defisit anggaran baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi, maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran.

---

<sup>42</sup> Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 70

<sup>43</sup> Karim, Adiwarmarman Azwar, *op, cit* hal.178

Menurut al-Maqrizi seperti yang dikutip Adiwarmanto Azwar Karim, percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga ( $P \uparrow$ ), menurunnya nilai mata uang secara drastis, akibatnya uang tidak lagi bernilai. Menurut al-Maqrizi kenaikan harga komoditas adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang fulus, sedangkan jika diukur dengan emas (dinar), harga-harga komoditas itu jarang sekali mengalami kenaikan. Uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertaransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal yang kecil.

Di Negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut: pertama, Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya para pengusaha akan menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Kedua, Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan tenaga kerja untuk meningkatkan produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk meminta kenaikan upah. Apabila kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari

berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga-harga barang mereka. Di dalam perekonomian yang sudah maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Inflasi juga bisa terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Keterbatasan kekayaan yang dimiliki menyebabkan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk melakukan belanja. Penggunaan kartu kredit untuk konsumsi merupakan upaya belanja dengan menggunakan kekayaan yang diharapkan akan diterima di masa datang. Hal ini menyebabkan bertambahnya uang beredar yang melebihi pendapatan yang mendorong terjadinya inflasi.

#### **D. Jenis-jenis Inflasi**

Berdasarkan sebab timbulnya inflasi, maka inflasi dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Policy induced* (ekspansi kebijakan), disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
2. *Cost-push inflation* (inflasi dorongan biaya), disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
3. *Demand-pull inflation* (inflasi dorongan permintaan), disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat

harga umum.

4. *Inertial inflation* (inflasi kelanjutan), cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.<sup>44</sup>

Sedangkan Sukirno, berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
3. Inflasi diimpor, inflasi ini juga terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak.<sup>45</sup>

Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi:

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)

---

<sup>44</sup> Huda, *Ekonomi Makro*, Op.Cit h1m 76-177

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 177

3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)<sup>46</sup>

Berdasarkan jenis-jenis tersebut ada dua jenis inflasi yang berbeda dan saling bertolak belakang yaitu, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*). Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas.

Pada umumnya inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh Pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal. Oleh karena itu, untuk mempertahankan agar inflasi rendah, perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya.<sup>47</sup> Pada *cost-push inflation* (inflasi desakan ongkos), disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka

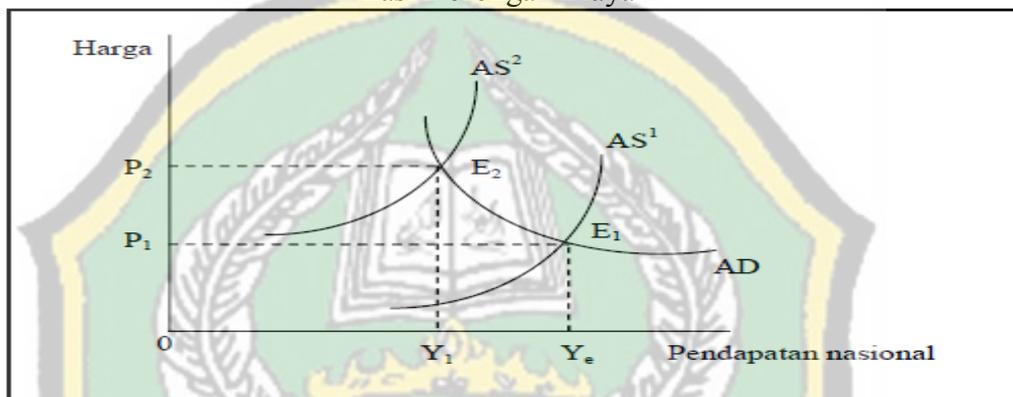
---

<sup>46</sup> Barro, Robert J., *Macroeconomics*, dalam Wikipedia, "Inflasi", <http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>, diunduh tanggal 15 Desember 2010 jam 11.42.15

<sup>47</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro, Op.Cit* hlm 178.

harga akan naik. Karena para pabrikan membayar lebih mahal atas bahan baku mereka menetapkan harga produk akhir yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedagang menaikkan harga barang itu, yang kemudian akan ditanggung oleh para konsumen. Dalam bentuk grafik, inflasi karena tarikan biaya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1  
Inflasi Dorongan Biaya



Sumber: Nurul Huda, et.al.<sup>48</sup>

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, dengan diasumsikan keseimbangan ekonomi mula-mula terjadi pada titik  $E_1$  dengan permintaan agregat/total AD (*Agregat Demand*) dan penawaran agregat  $AS^1$  ( $AS = Agregat Supply$ ). Misalkan buruh menuntut kenaikan upah. Akibatnya kurva AS bergeser ke kiri dari  $AS^1$  menjadi  $AS^2$ . Tingkat harga naik dari  $P_1$  ( $P = Price/Harga$ ) menjadi  $P_2$  dan output turun dari  $Y_e$  menjadi  $Y_1$  ( $Y = Yield/Pendapatan$ ) dengan keseimbangan baru tercapai pada titik  $E_2$  ( $E = Elastisitas/Keseimbangan$ ).<sup>49</sup>

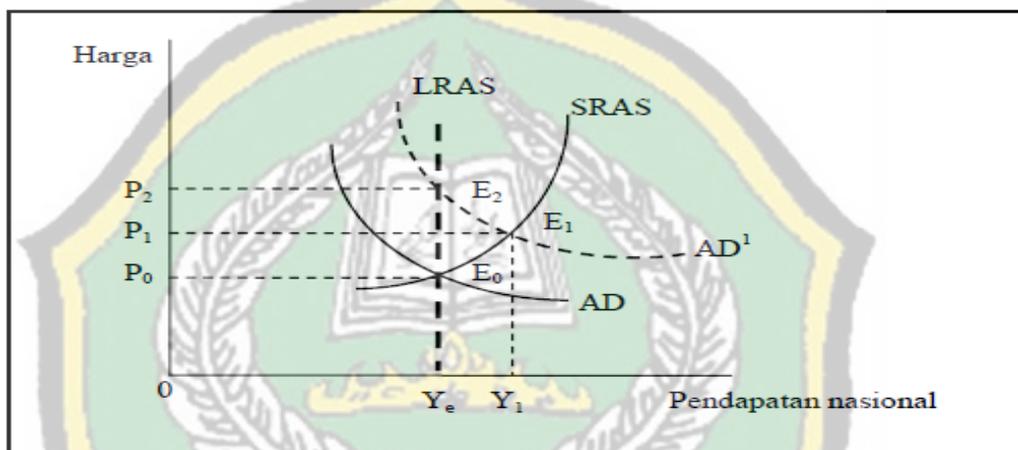
Sedangkan dalam *Demam-Pull Inflation* (inflasi karena tarikan

<sup>48</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro, Ibid.*, hlm. 179.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 180

permintaan), kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat (AS). Artinya, inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial. Dalam bentuk grafik, inflasi karena tarikan permintaan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2  
Inflasi Dorongan Permintaan



Sumber: Nurul Huda, et.al.<sup>50</sup>

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, dengan diasumsikan permintaan agregat bertambah, sehingga kurva AD bergeser ke kanan menjadi AD<sub>1</sub>. Akibatnya tingkat harga dan output naik di sepanjang kurva SRAS, masing-masing dari P<sub>0</sub> menjadi P<sub>1</sub> dan dari Y<sub>e</sub> menjadi Y<sub>1</sub>. Dalam jangka panjang, pendapatan nasional akan kembali menuju tingkat keseimbangan yang menunjukkan *full employment*/padat tenaga kerja (Y<sub>e</sub>). Akibatnya tingkat harga naik menjadi P<sub>1</sub> dan keseimbangan baru tercapai pada titik E<sub>2</sub>.<sup>51</sup>

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 182

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 187

Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.<sup>52</sup>

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *International Best Practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.<sup>53</sup>

Menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut;

1. *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai 'inflasi satu digit'. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan

---

<sup>52</sup> Bank Indonesia, "*Pengenalan Inflasi*" (Jakarta: Bina Ilmu, 2008) hlm, 34

<sup>53</sup> *Ibid.* 46

kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil;

2. *Galloping Inflation*: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil 'selamat' walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada berinvestasi di dalam negeri (*capital outflow*);
3. *Hyper Inflation*: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat 'mematikan' ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.<sup>54</sup>

Selain itu, menurut Adiwarmanto A. Karim inflasi dapat digolongkan

---

<sup>54</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi I*, Terj. A. Jaka Wasana M, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 298-303

karena penyebab yaitu sebagai berikut:

1. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*: Sesuai dengan namanya *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri;
2. *Actual/Anticipated/Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected Inflation*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi atau secara notasi, sedangkan pada *unexpected inflation* adalah tingkat suku bunga pinjaman tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
3. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull Inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian;
4. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian;
5. *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya;

6. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported Inflation* bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.<sup>55</sup>

### E. Inflasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia

Dalam konteks dampak inflasi pada suatu negara, penulis akan menjabarkan inflasi yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan berbagai permasalahan dan dinamika sosial politik yang pernah terjadi, juga pernah mengalami masa-masa sulit, setidaknya ada beberapa kali terjadi inflasi di Indonesia, secara singkat, inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Inflasi Pada Masa Kemerdekaan

Inflasi di Indonesia terjadi pertama kali pada masa awal kemerdekaan (1945-1953) pada masa itu Indonesia mengalami *hyperinflation*, hal ini disebabkan karena:

- a. Negara baru saja merdeka setelah mengalami perang yang berkepanjangan, sehingga belum memiliki pemerintahan yang baik dan mapan dalam mengatasi masalah ekonomi khususnya dan masalah lain pada umumnya;

---

<sup>55</sup> Adiwarmarman Karim, *Op.cit*, hlm. 138

- b. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak dikarenakan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah. Terdapat 3 mata uang yang berlaku dimasa itu yakni: mata uang The Javache Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang;
- c. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sehingga bahan-bahanpokok stoknya menipis atau bahkan habis, Indonesia tidak dapat mengexport barang, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.

*Hyperinflation* yang dialami Indonesia saat itu merupakan inflasi terparah yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *hyperinflation* berarti tingkat inflasi yang sudah tidak dapat ditolerir lagi (diatas 100% pertahun).

## 2. Inflasi Pada Tahun 1998

Selanjutnya pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter. Faktor yang menyebabkan krisis terjadi adalah:

- a. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek;
- b. Lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan lemahnya sistem perbankan di Indonesia;
- c. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah;

d. Situasi politik yang tidak stabil.

Dari keempat penyebab tersebut, yang menjadikan pemulihan krisis menjadi lamban adalah 2 faktor terakhir. Untuk pemulihan ekonomi diperlukan adanya kepercayaan pasar dan hal ini erat kaitannya dengan situasi politik. Apabila situasi politik tidak menentu ditambah dengan pemerintah yang erat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme maka investor akan menganggap pemerintah tidak *credible* sehingga tidak dapat memberikan rasa aman bagi mereka untuk berinvestasi.

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Inflasi Indonesia Periode Tahun 1998**

Bulan	Tahun 1998	
	IHK	Inflasi
Januari	119,85	6,88
Februari	135,14	12,76
Maret	142,15	5,18
April	148,83	4,70
Mei	156,63	5,24
Juni	163,89	4,64
Juli	177,92	8,56
Agustus	153,51	4,48
September	196,23	3,75
Oktober	155,70	-0,27
November	158,11	0,48
Desember	198,64	1,42
		<b>77,63</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel terlihat bahwa angka inflasi mencapai 77, 63 % dalam satu tahun, ini berarti inflasi yang terjadi tergolong dalam inflasi berat.

Angka inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai 12,76% sedangkan pada Mei yang merupakan bulan yang sangat genting, karena terjadi kerusuhan, penjarahan, demonstrasi besar hingga mencapai klimaks runtuhnya rezim Orde Baru yang ditandai pengunduran diri President RI, Bapak H.M. Suharto persentase inflasi berada diangka 5,24.

Setelah runtuh rezim Orde Baru yang digantikan era Reformasi, maka dimulai era baru tatanan pemerintahan Indonesia. Jika dahulu bersifat sentralisasi (terpusat) maka saat ini pemerintahan bersifat desentralisasi (terbagi), setiap provinsi memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya, *rules mode* ini disebut dengan otonomi daerah.

### 3. Inflasi Pasca Reformasi

Setelah 17 tahun inflasi berat dan krisis moneter berlalu kini Indonesia kembali menata kehidupan ekonomi, dibawah pimpinan dan kabinet baru kondisi ekonomi dapat dijaga dengan relatif baik, ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Tingkat Inflasi Indonesia Periode Tahun 2011 s/d 2015

Bulan	2011		2012		2013		2014		2015	
	IHK	Inflasi								
Januari	126,3	0,9	130,9	0,8	136,9	1,0	110,9	1,1	118,7	-0,2

Februari	126,5	0,1	131,0	0,1	137,9	0,8	111,3	0,3	118,3	-0,4
Maret	126,1	-0,3	131,1	0,1	138,8	0,6	111,4	0,1	118,5	0,2
April	125,7	-0,3	131,3	0,2	138,6	-0,1	111,4	0,0	118,9	0,4
Mei	125,8	0,1	131,4	0,1	138,6	0,0	111,5	0,2	119,5	0,5
Juni	126,5	0,6	132,2	0,6	140,0	1,0	112,0	0,4	120,1	0,5
Juli	127,4	0,7	133,2	0,7	144,6	3,3	113,1	0,9	121,3	0,9
Agustus	128,5	0,9	134,4	1,0	146,3	1,1	113,6	0,5	121,7	0,4
September	128,9	0,3	134,5	0,0	145,7	-0,4	113,9	0,3	121,7	-0,1
Oktober	128,7	-0,1	134,7	0,2	145,9	0,1	114,4	0,5	121,6	-0,1
November	129,2	0,3	134,8	0,1	146,0	0,1	116,1	1,5	121,8	0,2
Desember	129,9	0,6	135,5	0,5	146,8	0,6	119,0	2,5	123,0	1,0
<b>Tingkat Inflasi</b>		<b>3,7 9</b>		<b>4,3</b>		<b>8,38</b>		<b>8,36</b>		<b>3,35</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## F. Dampak Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh se-seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang / benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>56</sup>

Adapun dampak terjadinya inflasi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang
2. Melemahkan semangat menabung
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja
4. Mengarahkan investasi untuk hal-hal yang tidak produktif
5. Inflasi cenderung meredistribusi pendapatan ke atas sehingga menimbulkan ketidakseimbangan terhadap sasaran keadilan sosio ekonomi
6. Inflasi menyebabkan kurs menjadi over nilai yang diadopsi pemerintah untuk menahan tekanan-tekanan inflasioner
7. Inflasi akan menggalakan impor dan menghambat ekspor dengan menjadikannya tidak kompetitif pada pasaran internasional<sup>57</sup>

Menurut pratham dan manurung, yang dikutip oleh Nuulhuda dkk, dalam bukunya yang berjudul ekonomi makro islam pendekatan teoritis Inflasi telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu, produsen, maupun

---

<sup>56</sup> <http://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada tanggal 25 September pukul 20:25

<sup>57</sup> Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group Jakarta: 2006, hlm.75

pada kegiatan perekonomian keseluruhan. Adapun dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat yaitu:

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.<sup>58</sup>

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.<sup>59</sup>

1. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*). Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang

---

<sup>58</sup> Prathama Raharja dan Mandala Manurung; dalam Huda, *Ekonomi Makro*, hlm. 180

<sup>59</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, dalam Dedy Pratikno, "Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, SBI, dan Indeks Dow Jones Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 33

yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*). Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.
3. Efek Terhadap Output (*Output Effects*). Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi

mengarah kebarter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

## **G. Kebijakan-kebijakan Mengatasi Inflasi Dalam Konsep Ekonomi Islam**

Mewujudkan inflasi nol persen secara terus menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi sebab terjadi atau tidaknya inflasi tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan *al maslahah al ammah*. Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Oleh karena itu, sistem kapitalisme yang tidaklah bertentangan dengan Islam, dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam penanggulangan inflasi. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

### **1. Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu

kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.<sup>60</sup>

Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang lebih besar." Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Laffer's Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun.

Jika melihat praktek kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu:

Kebijakan pemasukan dari kaum Muslimin, yaitu:

---

<sup>60</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 15-16

1. Zakat, yaitu salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik.
2. Ushr, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dimana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang menarik dari kebijakan Rasulullah adalah dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdangan cepat mengalir sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi lancar. Beliau mengatakan bahwa barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.
3. Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
4. Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
5. Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.
6. Khumus adalah harta karun/temuan. Khumus sudah berlaku pada

periode sebelum Islam.

7. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak mungkin jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya.

Kebijakan pemasukan dari kaum non muslim, yaitu:

1. Jizyah (tribute capitis/ pajak kekayaan) adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.
2. Kharaj (tribute soil/pajak, upeti atas tanah) adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting.
3. 'Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham (Sirojuddin, 2013: 1).

## Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan Pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antara golongan yang berhak menerima pendapatan (distribusi pendapatan) adalah berdasarkan atas kriteria langsung dari Allah S.W.T yang tergambar di dalam al-Qur'an QS. At-Taubah Ayat 90:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>61</sup>

Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini terkenal dengan sebutan delapan ashnaf. Delapan asnaf ini langsung mendapat rekomendasi dari Allah S.W.T sehingga tidak ada yang bisa membatahnya. Ini artinya kriteria dalam al-Qur'an terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan atas kekayaan negara lebih rinci dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah kita yang secara umum diinklud-kan kepada orang-orang miskin saja.

Selain itu, Abu Yusuf (Wafat pada tahun 798 H) adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam

---

<sup>61</sup> Q.S 9 : 90

kitabnya, *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi.<sup>62</sup>

Penerimaan *zakat* dan *khums* dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan *built-in stability*. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat (keseluruhan) lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung *dari* hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut *tax on quasi rent*. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya *up-ward shift on supply curve*.<sup>63</sup>

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak

---

<sup>62</sup> Adiwarman Karim, *Op.cit*, hlm. 25  
<sup>63</sup> Adiwarman Karim, *Op.cit*, hlm. 26

yang dimiliki makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.

Dalam perspektif Islam kebijakan fiskal mempunyai peran penting, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai peran kebijakan *fiskal relative* dibatasi oleh dua hal yang mendasarinya :

1. Tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi islam
2. Islam tidak memperbolehkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai praktek perjudian yang mengandung spekulasi (untung-untungan). Pemerintah Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah mencapai nishab.

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. Al-Hashr ayat7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
ءَاتَىٰكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأَتِّهُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>64</sup>*

## 2. Kebijakan Moneter Islam

Menurut widodo, kebijakan adalah “Aturan tertulis yang merupakan keputusan fomal oganisasi,yang bersifat mengikat,yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”.<sup>65</sup> Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan pro aktif.

Secara etimologi, kata moneter berarti sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan mata uang, berhubungan dengan uang atau keuangan. Ada pula yang mengartikan moneter berarti segala sesuatu mengenai uang. Demikian pula S. Wojowasito mengartikan *monetary* sebagai “mengenai

---

<sup>64</sup> Q.S 59 : 7

<sup>65</sup> Widodo J Pudjiraharjo, *pengertian kebijakan*, dalam <http://massofa.wordpress.com>, diakses pada 13 September 2016, pukul 08:35 WIB

uang atau keuangan.<sup>66</sup> Sedangkan sistem moneter berarti suatu istilah umum yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi mata uang negara tertentu.<sup>67</sup> Dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia, manusia yang hidup dalam suatu negara membutuhkan stabilitas perekonomian. Salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian suatu negara ialah melalui kebijakan moneter yang tepat.

Secara terminologi, Boediono merumuskan: “Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang”.<sup>68</sup> Sedangkan Novirin mendefinisikan kebijaksanaan moneter adalah Tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>66</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 243

<sup>67</sup> Winardi, *Op.cit*, hlm. 337

<sup>68</sup> Boediono, *Ekonomi Makro, Op.Cit*, hlm. 96

Sedangkan moneter islam menurut Ali Sakti adalah sebagai segala aktifitas yang berkaitan dengan uang atau set likuid lainnya yang dilakukan dalam rangka menopang aktifitas riil(baik aktifitas di sisi *demand* maupun *supply*)”.

Dalam konsep ekonomi islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*)”.<sup>69</sup> Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang akan mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat.

Disamping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat yang kurang baik seperti tamak, akus dan malas beramal (*akat, infak, sodaqoh*) yang akan berimbass terhadap kelangsungan perekonomian oleh karena islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, monopoli kekayaan, sebagai mana telah disebutkan dalam QS: At-Taubah ayat 35 sebagai berikut:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

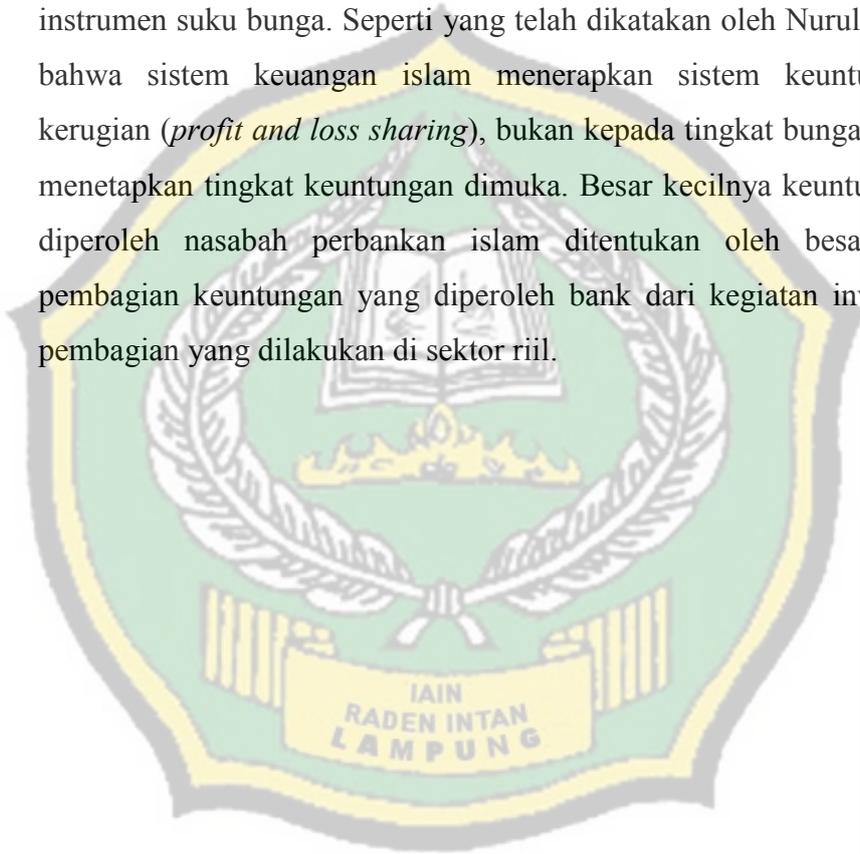
Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Jelsoft Enterprises Ltd, *kebijakan monete syariah dalam al-Qu'an dan Hadist*, dalam [http://www.indoforum.org/archive index.php-t-15335](http://www.indoforum.org/archive/index.php-t-15335), 10 april 2016

<sup>70</sup> Q.S 9 : 35

Adapun tujuan dari kebijakan moneter islam adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas uang. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan dan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Dalam perekonomian islam, sektor perbankan tidak menerapkan instrumen suku bunga. Seperti yang telah dikatakan oleh Nurul Huda dkk, bahwa sistem keuangan islam menerapkan sistem keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembagian yang dilakukan di sektor riil.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM EKONOMI KONVENSIONAL TENTANG INFLASI

#### A. Penyebab Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.<sup>71</sup>

Paul A. Samuelson mengatakan: *By inflation we mean a time of generally rising prices for goods and factors of production-rising prices for bread, cars, haircuts; rising wages, rents, etc. By deflation we mean a time when most prices and cost are falling.*<sup>72</sup> Jadi dalam perspektif Paul A. Samuelson, inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik; harga beras, bahan bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik. Sedangkan deflasi terjadi apabila harga-harga dan biaya-biaya secara umum turun.

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan

---

<sup>71</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175

<sup>72</sup> Paul A. Samuelson, *Economics*, tenth edition, (New York: McGraw-Hill Book Co, 1999), hlm. 154

mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang.

Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.<sup>73</sup>

Studi tentang penyebab inflasi di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain oleh Boorman (1975), Djiwandono (1980), Nasution (1983), Ahmad (1985), Ikhsan (1991). Namun pada umumnya dari studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya

---

<sup>73</sup> Nurul Huda, *Op.cit.*, hlm. 176

produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.<sup>74</sup>

Sampai batas tertentu ahli ekonomi masih bisa menganalisa sebab-sebab timbulnya inflasi khusus dari segi ekonomi; dan penentuan sebab-sebab "ekonomis obyektif" ini mungkin bukanlah tugas yang paling sukar. Dalam praktek, untuk mengetahui sebab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan, kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulangnya, adalah masalah yang sulit.

Biasanya ekonom harus melampaui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu untuk mengidentifikasi sebab-sebab "obyektif" dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak.<sup>75</sup>

Kalau mempertanyakan mengapa pemerintah terus mencetak uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut mengakibatkan inflasi, maka seringkali jawabannya terletak di bidang sosial politik, misalnya karena pemerintah membutuhkan uang untuk operasi keamanan, atau karena adanya pertarungan politik di antara golongan-golongan politik di dalam negeri, atau karena pemerintah tak berdaya menghadapi tuntutan politik golongan-

---

<sup>74</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15

<sup>75</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Teori Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm 102-103

golongan masyarakat tertentu yang menghendaki "bagian" dari anggaran belanja negara yang lebih banyak dari apa yang bisa disediakan dari sumber-sumber penerimaan negara, atau karena desakan-desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjamin kestabilan harga. Untuk bisa menghentikan pertambahan uang yang beredar yang berlebihan, dalam contoh-contoh ini, perlu dicapai penyelesaian politis lebih dahulu.<sup>76</sup>

Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan ditentukan oleh tata sosial-politis di masing-masing negara. Ahli ekonomi biasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomis-obyektif karena selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya, faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial-politik yang berbeda.

Teori-teori ekonomi mengenai inflasi lebih memusatkan pada dalil-dalil umum yang diharapkan berlaku secara umum, Ini tidak berarti bahwa ahli ekonomi seharusnya tidak perlu menyelidiki secara lebih mendalam faktor-faktor sosio-politik dari inflasi. Kalau ia ingin berguna, dalam arti bisa menentukan kebijaksanaan yang tepat untuk menanggulangi masalah inflasi di suatu negara, maka ia harus bisa mencapai "akar" dari permasalahan tersebut, yang belum tentu bersifat ekonomis-obyektif. Namun teori-teori ekonomi mengenai inflasi berguna sebagai titik tolak dari setiap analisa mengenai

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 103

inflasi.<sup>77</sup> Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroiti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam kenyataan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok. Ketiga teori ini adalah: teori kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis

### **1. Teori Kuantitas Uang**

Teori kuantitas uang adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi pada saat ini terutama di negara sedang berkembang. Teori ini menyoroiti peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Inti dari teori ini sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. Dengan bertambahnya jumlah uang beredar secara terus menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di

---

<sup>77</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2009)., hlm. 160

masa yang akan datang.<sup>78</sup>

Keadaan yang pertama adalah bila masyarakat belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, penambahan uang yang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah kemampuan likuiditasnya sehingga kenaikan jumlah uang yang dimiliki masyarakat tidak sepenuhnya dibelanjakan barang dan jasa sehingga jika pemerintah menaikkan jumlah uang beredar sebesar 10% maka kenaikan ini hanya diimbangi oleh kenaikan harga barang-barang sebesar 1% saja. Kondisi ini tidak disadari masyarakat bahwa inflasi mulai timbul dan sedang berlangsung.

Keadaan yang kedua adalah dimana masyarakat mulai sadar akan adanya inflasi sehingga masyarakat mengharapkan kenaikan harga. Dengan demikian jika ada penambahan jumlah uang beredar, maka pertambahan uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa karena masyarakat merasa rugi untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Kondisi ini sebenarnya malah menaikkan harga barang dan jasa namun masyarakat sudah mampu menghadapi inflasi ini karena inflasi sudah berjalan cukup lama dan mereka sudah mampu menghadapinya. Sehingga misalnya terjadi penambahan jumlah uang beredar sebesar 10% akan diimbangi dengan kenaikan harga sebesar 10% juga.

---

<sup>78</sup> Endang Setyowati, *Ekonomi Makro Pengantar*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2000), hlm. 157

Keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah. Dalam keadaan ini, orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang tunai dan keinginan untuk membelanjakan makin meluas di masyarakat. Orang-orang cenderung mengharapkan kenaikan harga yang makin tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah uang yang beredar.<sup>79</sup>

## 2. Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Proses inflasi menurut kelompok ini adalah proses perebutan bagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang mampu disediakan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan *inflationary gap* karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.

Golongan-golongan tersebut bisa pemerintah yang berusaha memperoleh lebih banyak barang dengan cara mencetak uang untuk mendanai kebutuhannya tersebut. Golongan yang lain bisa pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan investasi dengan mengambil kredit dari bank atau bisa juga serikat buruh yang meminta kenaikan upah melebihi produktivitasnya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Endang Setyowati, *Ibid.* hlm. 157

<sup>80</sup> Boediono, *Ekonomi Makro...*, *Op. Cit.* hlm. 163

### 3. Teori Strukturalis

Teori ini memberikan titik tekan pada ketegaran atau infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Faktor-faktor strukturalis inilah yang menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang berjalan sangat lambat dalam jangka panjang. Teori ini seringkali disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini ada dua ketegaran utama yang dapat menimbulkan inflasi.

*Pertama*, ketidakelastisan penerimaan ekspor yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: jenis barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga dan nilai tukar barang ekspor yang semakin memburuk. Kedua hal inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang. Mengambil keputusan menggalakkan industri substitusi impor, meskipun dengan biaya produksi yang lebih mahal dan kualitas yang lebih rendah. Dengan demikian, industri substitusi impor ini dapat mengakibatkan inflasi yang dikarenakan adanya ekonomi biaya tinggi.

*Kedua*, ketidakelastisan produksi bahan makanan di dalam negeri. Dalam hal ini laju pertumbuhan bahan makanan di dalam negeri tidak secepat laju pertumbuhan penduduk dan laju pendapatan perkapita. Akibat dari keadaan ini terjadi kenaikan harga barang-barang lainnya. Selanjutnya akan muncul tuntutan dari para karyawan untuk memperoleh kenaikan upah, dengan demikian akan menyebabkan

kenaikan ongkos produksi, sehingga biaya produksi total meningkat. Hal ini menyebabkan pengusaha meningkatkan harga-harga produknya.<sup>81</sup>

## **B. Jenis- Jenis Inflasi**

Menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut;

1. *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai 'inflasi satu digit'. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil;
2. *Galloping Inflation*: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil 'selamat' walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya

---

<sup>81</sup> Endang Setyowati, *Op.cit*, hlm. 158

untuk berinvestasi di luar negeri daripada berinvestasi di dalam negeri (*capital outflow*);

3. *Hyper Inflation*: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat 'mematikan' ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.<sup>82</sup>

Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi:

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)<sup>83</sup>

### C. Dampak Inflasi

Dampak inflasi bagi perekonomian nasional di antaranya:

1. investasi berkurang;
2. mendorong tingkat bunga;
3. mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif;
4. menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan;

---

<sup>82</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi 1*, Terj. A. Jaka Wasana M, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 298-303

<sup>83</sup> Barro, Robert J., *Macroeconomics*, dalam Wikipedia, "Inflasi", <http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>, diunduh tanggal 15 Juli 2016

5. menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang;
6. menyebabkan daya saing produk nasional berkurang;
7. menimbulkan defisit neraca pembayaran;
8. merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari
9. meningkatnya jumlah pengangguran.<sup>84</sup>

Selain itu inflasi menimbulkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan akuntansi misalnya:

1. Inflasi menyebabkan dilema penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode biaya historis atau metode biaya aktual;
2. Inflasi menyebabkan permasalahan akuntansi dalam hal pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner;
3. Inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi (*index*) untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat.<sup>85</sup>

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditor atau debitur, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi di atas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

---

<sup>84</sup> Nurul Huda, *Op.cit.*, 181

<sup>85</sup> Edwin Nasution, Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm 78

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Begitu pun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat.

Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang lunak (*mild inflation/creeping inflation*) dapat merangsang bisnis sektor untuk memperluas produksinya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Namun kalau tidak hati-hati inflasi yang lunak sekalipun dapat berubah menuju inflasi yang lebih hebat. Dalam inflasi, masyarakat cenderung enggan menabung, dan juga enggan pegang uang kas/tunai, sebab nilai riil uang terus

merosot. Masyarakat cenderung lebih suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang.

Keadaan demikian akan mendorong timbulnya spekulasi perdagangan dan dapat menciptakan inflasi yang jauh lebih hebat (*hyper inflation*). Selain itu, dalam inflasi terjadi kenaikan harga-harga umum, namun kenaikan harga itu tidak selain searah dan dengan intensitas yang sama adanya kenaikan harga umum juga akan menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal, sehingga barang ekspor akan menjadi sulit bersaing di pasar internasional.<sup>86</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi akan menyebabkan nilai riil setiap satuan uang merosot, sehingga mereka yang berpendapatan tetap (nilai nominalnya), daya belinya terus merosot. Demikian pula mereka yang meminjamkan uang akan sangat dirugikan. Sebab pada saat jatuh tempo mereka akan menerima uang mereka dengan nilai riil lebih rendah. Dalam inflasi kenaikan harga barang berjalan dengan intensitas yang sama akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki faktor produksi ataupun barang dan jasa yang mengalami intensitas kenaikan paling tinggi. Sebab, mereka akan menikmati *capital gain* (keuntungan yang didapat karena adanya kenaikan harga) yang paling tinggi. Dalam keadaan inflasi mereka yang mempunyai kekayaan lebih banyak jauh lebih bisa bertahan dari mereka yang lebih miskin. Orang mengatakan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin (secara relatif paling tidak). Dengan demikian inflasi

---

<sup>86</sup> Carla Poli, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Terj. Arifinal Chaniago, (Jakarta: Aptik, 2012), hlm. 298

dapat memperburuk distribusi pendapatan di antara masyarakat dan menjauhkan tercapainya keadilan yang dicita-citakan.

#### **D. Kebijakan-Kebijakan Dalam Mengatasi Inflasi Menurut Ekonomi Konvensional**

##### **1. Kebijakan fiskal**

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).<sup>87</sup> Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.<sup>88</sup> Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.<sup>89</sup> Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam

---

<sup>87</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 203

<sup>88</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 159

<sup>89</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 170

perekonomian.<sup>90</sup>

Menurut salah satu ahli ekonomi Sadono Sukirno menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada. Ahli ekonomi yang lain yaitu Tulus TH Tambunan menyatakan mengenai pertanyaan  **jelaskan kebijakan fiskal**, ia beranggapan yang paling pokok pada kebijakan tersebut adalah bagaimana mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan yang kedua adalah bagaimana menstabilkan ekonomi makro yang ada di Indonesia. Dari pendapat kedua ahli tersebut tentunya sudah semakin jelas arah tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia.

Berdasarkan semua penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal manajemen keuangan dari negara yang dilakukan dengan tujuan untuk membawa keadaan perekonomian yang lebih baik serta mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, namun tetap terbatas pada hal penerimaan dan pengeluaran negara yang telah tertulis pada APBN.<sup>91</sup>

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan

---

<sup>90</sup> Sadono Sukirno, *Ibid*, hlm. 205

<sup>91</sup> Hendrawinata Eddy Siddharta,  *jelaskan kebijakan fiskal di Indonesia*, dalam <http://www.fiskal.co.id/berita> (16 februari 2015)

fiskalsebagai berikut :

1. Mengurangi pengeluaran pemerintah

Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang,yang pada akhirnya dapat menurunkan harga-harga.

2. Menaikan tarif pajak

Menaikan tarif pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat.sehingga akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa dan efek yang dihasilkan dapat menurunkan harga-harga.

**3. Kebijakan Moneter**

Menurut widodo, kebijakan adalah “Aturan tertulis yang merupakan keputusan fomal oganisasi,yang bersifat mengikat,yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”.<sup>92</sup> Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan pro aktif.

Secara etimologi, kata moneter berarti sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan mata uang, berhubungan dengan uang atau keuangan. Ada pula yang mengartikan moneter berarti segala sesuatu mengenai uang. Demikian pula S. Wojowasito mengartikan *monetary* sebagai “mengenai

---

<sup>92</sup> Widodo j Pudjiraharjo,*pengertian kebijakan*, dalam <http://massofa.wordpress.com>, 13 desember 2015

uang atau keuangan.<sup>93</sup> Sedangkan sistem moneter berarti suatu istilah umum yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi mata uang negara tertentu.<sup>94</sup> Dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia, manusia yang hidup dalam suatu negara membutuhkan stabilitas perekonomian. Salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian suatu negara ialah melalui kebijakan moneter yang tepat.

Secara terminologi, Boediono merumuskan: “Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang”.<sup>95</sup> Sedangkan Novirin mendefinisikan kebijaksanaan moneter adalah Tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>93</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris*, (Bandung: Alumni,2003), hlm. 243

<sup>94</sup> Winardi, *Op.cit*, hlm. 337

<sup>95</sup> Boediono, *Ekonomi Makro...*,hlm. 96

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INFLASI

Dalam sudut pandang faham ekonomi, baik Kapitalis, Sosialis maupun ekonomi Islam sekalipun, inflasi merupakan suatu problem yang hampir pasti pernah terjadi di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun. beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga barang, seiring dengan dinamika yang terjadi dalam negara tersebut. Penyebabnya amat beragam, mulai dari faktor *human error* maupun karena sebab yang memang berada di luar batas kemampuan manusia untuk merubahnya, faktor ini sering di sebut dengan pengaruh mekanisme pasar yang di sebabkan oleh *invisible hand* (kekuasaan Tuhan).

Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu untuk mengidentifikasi sebab-sebab "obyektif" dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Inflasi dengan beragam penyebabnya tentu memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, namun juga menjadi problem di beberapa negara adidaya, apatah lagi di negara-negara yang sedang dirundung konflik. Sebagai contoh adalah bagaimana negara maju seperti Yunani juga pernah merasakan dampak inflasi, saat negara tersebut ditimpa krisis pada 2014-2015 lalu, bahkan Amerika dan beberapa

negara di Eropa juga terkena dampak dari krisis Yunani tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara juga mengalami hal yang sama, walaupun dengan tingkat inflasi yang berbeda-beda. Kesigapan dan langkah preventive, serta kebijakan pemerintah juga respon pasar, serta kondisi sosial masyarakat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya inflasi tersebut, semakin tepat kebijakan yang diambil oleh *stake holder* maka dampaknya semakin dapat diminimalisir.

Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan ditentukan oleh tata sosial-politis di masing-masing negara. Ahli ekonomi biasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomis-obyektif karena selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya, faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial-politik yang berbeda.

Secara garis besar penyebab inflasi dalam sudut pandang teori ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Dalam Teori Ekonomi Konvensional**

Teori ekonomi konvensional menyatakan bahwa faktor penyebab inflasi dapat terjadi adalah karena kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga

permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.

Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan ditentukan oleh tata sosial-politis di masing-masing negara. Ahli ekonomi biasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomis-obyektif karena selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya, faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial-politik yang berbeda.

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan faktor penyebab inflasi, secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam kenyataan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok. Ketiga teori ini adalah: teori kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis.

a. Teori Kuantitas Uang

Menurut teori ini, inflasi dapat terjadi karena dua hal yaitu:

- 1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. Dengan bertambahnya jumlah uang beredar secara terus

menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga.

- 2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang.

b. Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Proses inflasi menurut kelompok ini adalah proses perebutan bagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang mampu disediakan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan *inflationary gap* karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.

Hal ini amat sangat mungkin terjadi, bila mengacu kepada teori ekonomi kapitalis maupun sosialis yang menyerahkan sepenuhnya tingkat fluktuasi harga terhadap pasar dan menganggap bahwa intervensi terhadap harga pasar adalah tidak perlu dilakukan, karena tingkat harga akan ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar itu sendiri. Terlebih lagi teori kapitalis menghalalkan setiap individu untuk memperoleh penghasilan dan menguasai faktor-faktor produksi tanpa ada pembatasan distribusi. Keadaan ini dengan sendirinya akan lebih menguntungkan bagi mereka yang berkantong

tebal (kaum borjuis), sebaliknya akan semakin menghimpit kaum proletar sebagai kalangan mayoritas di hampir setiap negara.

Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Tiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonominya menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya, persaingan bebas, selagi tidak melanggar norma-norma masyarakat dan tiap individu bebas mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaannya. Tiap individu bebas mengoptimalkan semua potensi ekonominya baik fisik, mental dan sumber daya lainnya menurut keinginannya. Terjadinya ketimpangan pada sistem ekonomi kapitalis adalah karena modal memegang peranan yang strategis.

c. Teori Strukturalis

Teori ini memberikan titik tekan pada ketegaran atau infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Faktor-faktor strukturalis inilah yang menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang berjalan sangat lambat dalam jangka panjang. Teori ini seringkali disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini ada dua ketegaran utama yang dapat menimbulkan inflasi:

- 1) Ketidak elastisan penerimaan ekspor yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-

sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu: jenis barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga dan nilai tukar barang ekspor yang semakin memburuk.

2) ketidakelastisan produksi bahan makanan di dalam negeri.

Dalam hal ini laju pertumbuhan bahan makanan di dalam negeri tidak secepat laju pertumbuhan penduduk dan laju pendapatan perkapita. Akibat dari keadaan ini terjadi kenaikan harga barang-barang lainnya. Selanjutnya akan muncul tuntutan dari para karyawan untuk memperoleh kenaikan upah, dengan demikian akan menyebabkan kenaikan ongkos produksi, sehingga biaya produksi total meningkat. Hal ini menyebabkan pengusaha meningkatkan harga-harga produknya.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Dalam Teori Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam penyebab inflasi dibagi dalam 2 sebab besar yaitu: *natural inflation*, jenis inflasi ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, contohnya akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan *boycott*. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia, contohnya korupsi dan administrasi yang buruk.

### a. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (

dalam hal mencegah ). Ibn Al-Marizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Hal ini terjadi akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregat (AD). Selain itu juga disebabkan oleh turunnya tingkat produksi *agregatif supply (AS)* karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot, bisa juga disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di suatu negara atau akibat musim paceklik karena gagal panen, sehingga pesediaan barang kebutuhan pokok berkurang sehingga mengakibatkan meningkatnya harga komoditas tersebut.

**b. *Human Error Inflation***

Faktor inflasi yang bukan disebabkan oleh faktor alam, akan tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, *human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut :

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk
- 2) Pajak yang berlebihan (*excessie tax*)
- 3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*)

## B. PENGARUH INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam konteks dampak inflasi pada suatu negara, penulis akan menjabarkan inflasi yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan berbagai permasalahan dan dinamika sosial politik yang pernah terjadi, juga pernah mengalami masa-masa sulit, setidaknya ada beberapa kali terjadi inflasi di Indonesia, secara singkat, inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Inflasi Pada Masa Kemerdekaan

Inflasi di Indonesia terjadi pertama kali pada masa awal kemerdekaan (1945-1953) pada masa itu Indonesia mengalami *hyperinflation*, hal ini disebabkan karena:

- a. Negara baru saja merdeka setelah mengalami perang yang berkepanjangan, sehingga belum memiliki pemerintahan yang baik dan mapan dalam mengatasi masalah ekonomi khususnya dan masalah lain pada umumnya;
- b. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak dikarenakan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah. Terdapat 3 mata uang yang berlaku dimasa itu yakni: mata uang The Javache Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang;
- c. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sehingga bahan-bahan pokok stoknya menipis atau bahkan habis, Indonesia tidak dapat

mengexport barang, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.

## 2. Inflasi pada tahun 1998

Masa ini adalah masa yang merupakan masa transisi kekuasaan dari orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, yang akhirnya diakhiri dengan pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan setelah serangkaian drama politik ketika itu. Suasana politik yang tidak stabil dan kerusuhan sosial yang terjadi kala itu membawa bangsa dan negara ini ke jurang kehancuran ekonomi. Nilai tukar Rupiah menurun drastis menyentuh 15.000,- per 1 Dollar Amerika. Kondisi *chaos* kala itu turut andil dalam memperparah inflasi yang terjadi, ketidak stabilan politik dan hilangnya rasa aman memaksa sebagian besar investor ramai-ramai menarik modalnya dari Indonesia.

Pemerintahan baru setelah reformasi langsung mendapatkan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Beruntung pemerintah kala itu cukup sigap dalam mengambil kebijakan moneter guna mengatasi inflasi yang menggila kala itu, walaupun belum bisa dikatakan berhasil secara total, namun paling tidak angka inflasi dapat ditekan dan kondisi sosial politik perlahan mulai membaik. Dan hal ini dilakukan dengan sangat baik, dalam rentang waktu yang cukup singkat, tidak lenih dari satu tahun sejak era presiden BJ. Habibie. Walaupun efek domino dari inflasi tersebut masih belum bisa terselesaikan seluruhnya,

terutama kondisi keamanan nasional, sehingga berujung pada terjadinya referendum Timor Timur kala itu.

### 3. Inflasi Pasca Reformasi

Setelah 17 tahun inflasi berat dan krisis moneter berlalu kini Indonesia kembali menata kehidupan ekonomi, dibawah pimpinan dan kabinet baru kondisi ekonomi dapat dijaga dengan relatif baik, meskipun belum bisa dikatakan betul-betul baik. Tetapi paling tidak kepastian hukum dan upaya pemberantasan korupsi secara massive gencar dilakukan, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap stabilnya kondisi sosial dan keamanan dalam negeri yang berujung kepada tidak semakin memburuknya kondisi ekonomi negara.

Ditengah gencarnya isu terror dan konflik di berbagai negara Timur Tengah dan sebagian negara Asia, namun kondisi keamanan di Indonesia masih relative kondusif. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi pasar dan iklim investasi dalam negeri. Namun amat disayangkan, kondisi ini tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, dan makin meningkatnya angka usia produktif yang menjadi angkatan pencari kerja, namun tidak disertai dengan kualitas individual dan skill yang memadai, sehingga hal ini menjadi ancaman serius menjelang berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia).

Masih rendahnya daya saing serta minimnya akses untuk meraih pendidikan yang memadai memaksa sebagian besar masyarakat usia produktif di Indonesia terpaksa hanya mampu berperan sebagai tenaga kerja rendahan

yang berpenghasilan rendah. Hal ini masih diperparah dengan adanya eksodus para pekerja asing dari China yang semakin mempersempit peluang kerja pekerja lokal, sayangnya hal ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat. Besarnya ketergantungan ekonomi dan massifnya pendanaan hutang dari China memaksa pemerintah terkesan “lunak” terhadap agresi pekerja imigran dari China ini. Jika hal ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketimpangan ekonomi dan memburuknya situasi keamanan dalam negeri yang diakibatkan oleh ketimpangan *social economi* dalam masyarakat, sehingga akan berujung pada terjadinya inflasi.

### **C. Cara Penanggulangan Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan *al maslahah al ammah*. Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Oleh karena itu, sistem kapitalisme yang tidaklah bertentangan dengan Islam, dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam penanggulangan inflasi. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

#### **1. Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus.

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. Al-Hashr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

## 2. Pengendalian Inflasi Dalam Kebijakan Moneter Islam

Inflasi adalah masalah ekonomi yang harus segera diselesaikan, dimana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dampak dari inflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh semakin membengkaknya jumlah pengangguran, harga barang menjadi mahal dan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Dalam menyelesaikan masalah ekonomi ini, solusi yang ditawarkan adalah menggunakan Sistem Ekonomi Islam. Yaitu melalui kebijakan moneternya, atau sering disebut dengan Kebijakan Moneter Islam.

Walaupun di beberapa negara yang mayoritas muslim, belum sempurna penerapan instrumen Syari'ahnya (Moneter Islam). Karena instrumen Syari'ah, baru usaha untuk mensyari'ahkan secara bertahap belum secara menyeluruh. Negara-negara tersebut belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem konvensional. Seperti Indonesia, di samping instrumen Syari'ah, instrumen konvensional tetap berjalan, bahkan Sistem Konvensional yang lebih banyak berjalan.

Dalam kebijakan Moneter Islam, ciri yang menonjol dalam kegiatan ekonominya nampak dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Berbasis Syari'ah

Pada lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan, praktik kegiatannya atau operasionalnya berbeda dengan perbankan berbasis konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sistem Keuangan Syari'ah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian bukan sistem bunga dengan penetapan kepastian *return* dimuka. Maka, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank disektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan disektor moneter, bukannya tingkat bunga.

Tingkat bungan dianggap sebagai harga diri dari komoditas uang. Perdagangan surat berharga di pasar uang dan produk-produk keuangan lainnya, pada hakikatnya menjadi perdagangan komoditas uang. Tingkat bunga juga memicu semakin derasnya motif untuk

berspekulasi dibandingkan dengan motif bertransaksi dan berjaga-jaga dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep Islam diakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga, sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya disektor moneter.

Walaupun perkembangan sistem moneter dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran suku bunga yang mampu mendorong pertumbuhan sektor keuangan dengan sangat cepat. Tingkat bunga menjadi pertemuan antara keseimbangan pasar barang dengan pasar uang sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian. Suku bunga dengan menggunakan persentase membantu dalam perhitungan-perhitungan bunga menjadi pendapatan atau biaya yang tetap dan pasti. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa pendapatan atau beban biaya yang tetap dan pasti itu sebenarnya telah bertentangan dengan hakikat hidup manusia yang penuh dengan ketidakpastian.

Sesungguhnya Islam tidak mengharamkan seseorang untuk mencari pendapatan, memiliki harta dan melipat gandakannya, asal saja diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai dengan Syari'at baik melalui usaha pribadi maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas

dari pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil antara pemilik (modal) dengan usaha, serta memikul resiko, secara berani dan penuh rasa tanggungjawab.

b. Ketentuan Terhadap Mata Uang

Berdasarkan persoalan tentang bunga, nampak jelas bahwa Islam telah melarang praktik bunga. Dengan demikian Islam melalui kebijakan moneter Islamnya telah memiliki strategi khusus, yaitu dengan menetapkan ketentuan baku terhadap mata uang (dinar atau dirham).

Penggunaan mata uang dinar dan dirham dalam kegiatan ekonomi, Islam telah menetapkan sebuah aturan yang baku, yaitu:

- 1) Islam mengharamkan menimbun emas dan perak, karena dapat menghambat kegiatan ekonomi (transaksi barang dan jasa) dan telah bertentangan dengan Syari'at Islam.
- 2) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku.
- 3) Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.
- 4) Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan *nisbah* zakat tersebut dengan *nisbah* emas dan perak.

5) Islam telah memiliki ketetapan hukum terhadap pertukaran. Yakni, Islam telah menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. Dengan kata lain, menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antara jenis yang berbeda seperti membeli emas dengan perak.

Pada dasarnya, ketentuan terhadap mata uang dinar dan dirham jika ditinjau dari tujuannya, maka tidak berbeda dengan ketentuan terhadap mata uang yang lainnya, seperti mata uang rupiah. Yaitu supaya mempermudah dalam kegiatan transaksi. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah terhadap nilai dari bahan untuk membuat mata uang itu sendiri. Jika dinar dan dirham terbuat dari jenis emas dan perak, sedangkan rupiah terbuat dari kertas dan logam. Dimana nilai dari emas dan perak lebih tinggi jika dibandingkan dengan kertas dan logam, serta nilainya akan relatif stabil.

c. Produksi Barang

Dalam konsep ekonomi konvensional produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen.

Walaupun dalam Ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama

berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep Mashlahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah.

Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan. Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari berkah dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya berkah), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan.

Berkah menjadi komponen penting dalam *mashlahah*. Karena berdasarkan pertimbangan kemashalahatan, pertimbangan produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar, sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat terabaikan.

Dari sudut pandang fungsional, produksi atau merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai

tambah. Dari fungsinya demikian, produksi meliputi aktivitas produksi sebagai berikut; apa yang diproduksi, berapa kuantitas produksi, kapan produksi dilakukan, mengapa suatu produk diproduksi, bagaimana proses produksi dilakukan dan siapa yang memproduksi.

d. Penetapan Harga Barang

Harga sangat mempengaruhi permintaan akan suatu barang ataupun jasa. Dalam hal penentuan harga bagi seorang produsen sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada keputusan dalam perkembangannya maupun kemunduran usahanya. Oleh karena itu penentuan harga perlu diperhitungkan dengan cermat dan hati-hati untuk melindungi penjual dan pembeli.

Dalam rangka melindungi hak-hak pembeli dan penjual, Islam telah memperbolehkan pemerintah dalam intervensi harga. Adapun faktor-faktor yang memperoleh intervensi harga antara lain:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Karena dapat melindungi penjual dan pembeli.
- 2) Intervensi harga mencegah terjadinya *Ikhtikar*.
- 3) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama pembeli. Karena pembeli akan mengkonsumsi barang-barang yang telah diproduksi oleh penjual dan pada umumnya pembeli mewakili masyarakat yang lebih luas jika dibandingkan dengan penjual. Walaupun demikian, pemerintah

juga harus memperhatikan penjual, agar keduanya dapat berjalan dengan seimbang.

Penentuan harga sangatlah penting, hal ini terbukti bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri. Rasulullah SAW mendeskripsikan bahwa harga adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atasnya, yang terasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Kebijaksanaan penentuan harga sesungguhnya erat sekali hubungannya dengan usaha pemasaran barang yang sedang dilaksanakan pimpinan atau suatu badan usaha.

Dalam pemasaran barang, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan sangat diperlukan adanya berbagai informasi. Demikian pula

dalam menentukan salah satu kebijaksanaan harga jual barang yang diproduksi oleh suatu badan usaha.

Khusus mengenai kebijaksanaan yang akan dilakukan dalam rangka menetapkan harga barang/ jasa, harus pula diperhatikan adanya keseimbangan di antara faktor-faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi, yaitu antara lain:

- 1) Faktor permintaan barang
- 2) Faktor biaya yang diperlukan dalam pembuatan barang/ jasa
- 3) Faktor keuntungan yang diharapkan (harga jual dikurangi biaya-biaya)

Pada dasarnya untuk dapat menjalankan ketiga cara kebijaksanaan dalam menetapkan harga, adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan harga mengikuti harga saingan

Dengan kebijaksanaan ini pengusaha bermaksud dapat mempertahankan jumlah pelanggan, dengan maksud agar mereka tidak pindah sebagai pembeli ke toko-toko yang lain. Dengan kebijaksanaan penetapan harga mengikuti/ sesuai dengan harga pasaran umum.

- 2) *One Price Policy*

Kebijaksanaan harga ini ditentukan untuk barang-barang sejenis dan sekualitas yang dijual dengan harga yang sama kepada setiap pembeli atau golongan pembeli.

- 3) *Variable Price Policy*

Kebijaksanaan dalam menetapkan perbedaan harga jual terutama diadakan terhadap berbagai golongan konsumen tertentu, tergantung

pula misalnya pada perbedaan kedudukan sosial konsumen, tingkat kehidupannya, perbedaan daerah konsumen dan lain sebagainya.

4) *Discount Price Policy*

Kebijaksanaan harga yang ditetapkan di sini mempunyai maksud memberikan potongan harga kepada para pelanggan. Terutama untuk barang-barang tertentu yang masih memerlukan dorongan dalam penjualannya.

5) *Odd Price Policy*

Penetapan harga ini maksudnya dengan mengadakan selisih harga sedikit di bawah angka (harga) yang bulat. Umpamanya harga salah satu jenis sepatu *Carvil* Rp. 70.000,- di ubah menjadi Rp. 69.950,-. Pertimbangan psikologis dalam penentuan harga di sini maksudnya tiada lain untuk menarik perhatian dan mengikuti dalam pikiran para konsumen, seakan-akan dengan selisih harga yang sedikit itu terasa lebih murah.

6) *Resale Price Policy*

Dalam hubungan ini produsen menetapkan harga eceran tertinggi barang-barang yang diproduksinya dan tidak boleh diubah oleh para pedagang eceran. Dengan demikian diharapkan para pelanggan akan menaati harga pasti itu. Kebijakan yang diambil seperti ini serupa dengan suatu kebijaksanaan harga yang ditentukan oleh pemerintah dalam menetapkan harga barang tertentu dengan Harga Eceran Tertinggi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan analisa yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor penyebab terjadinya inflasi

- a. Natural inflation (inflasi yang terjadi karena sebab alamiah) : Bencana alam
- b. Human error (inflasi terjadi karena kesalahan manusia) : Korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, pencetakan uang yang berlebihan, sifat Israf atau berlebih-lebihan dari setiap individu.

##### 2. Pengaruh Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia

- a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- b. Memperburuk distribusi pendapatan .

##### 3. Cara Penanggulangan Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

- a. Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Dalam perspektif Islam kebijakan fiskal berperan penting karena mengatur dalam pemasukan dan pengeluaran negara agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan merata.

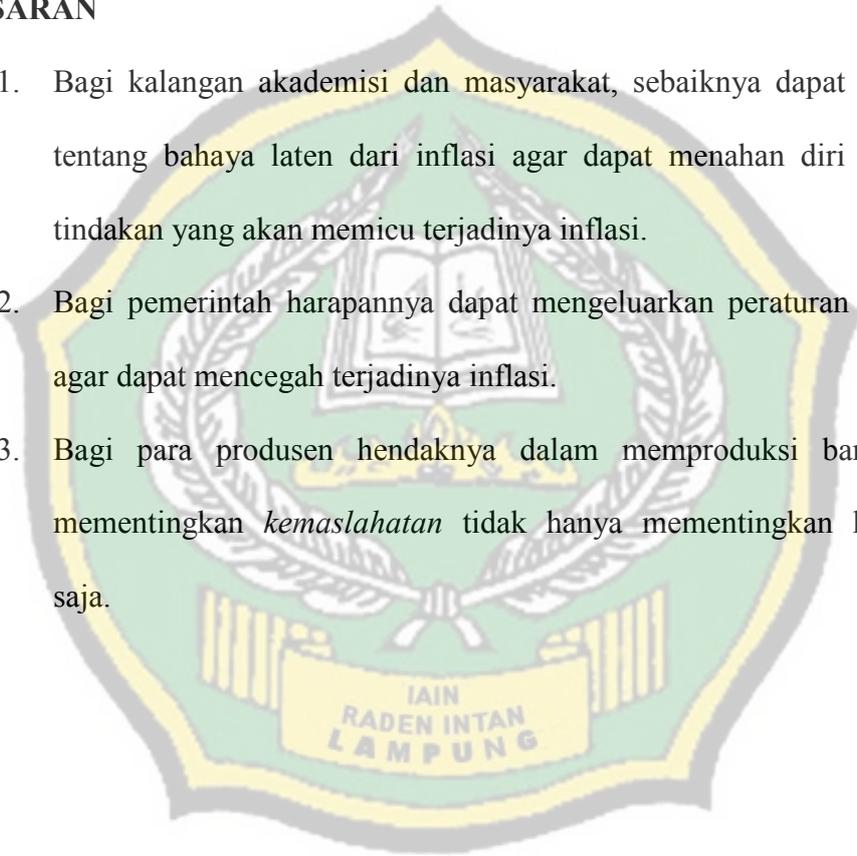
- b. Kebijakan Moneter dalam Islam

Dalam Kebijakan moneter Islam dapat di artikan sebagai segala

aktifitas yang berkaitan dengan uang atau set likuid lainnya yang dilakukan dalam rangka menopang aktifitas riil (baik aktifitas di sisi *demand* maupun *supply*)”. Adapun tujuan dari kebijakan moneter islam adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas uang.

## B. SARAN

1. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat, sebaiknya dapat memahami tentang bahaya laten dari inflasi agar dapat menahan diri melakukan tindakan yang akan memicu terjadinya inflasi.
2. Bagi pemerintah harapannya dapat mengeluarkan peraturan yang tepat agar dapat mencegah terjadinya inflasi.
3. Bagi para produsen hendaknya dalam memproduksi barang harus mementingkan *kemaslahatan* tidak hanya mementingkan keuntungan saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.
- A. Samuelson, Paul, *Economics Tenth Edition*, Graw Hill Book co, New York, 1999.
- A. Samuelson, Paul dan Denordhaus, William, *Ekonomics I*, Terjemah Wasani, A. Jaka, Erlangga, Jakarta, 2002
- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Makro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Abdul Wakaf, Solihin, *Analisis Kebijakan Dari Reformulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, 2005.
- Boediono, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta, 2009.
- Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Teori Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 2009.
- Chapra, Umer, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Terjemah Rumampea, Tumpul dan Haloho, Posma, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Edwin Nasution, Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006
- <http://www.mutiarahadist.com>.
- <http://finance.detik.com>.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1989.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

- Kalif, Monjer, *Ekonomi Islam (Telaah Analistik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Lexi, J. Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Manulung M, *Ekonomi Moneter*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Partadiredja AC, *Pengantar Ekonomika*, BPFE, Yogyakarta, 2006.
- Poli, Carla, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Terjemah Chaniago, Arifinal, Optik, Jakarta, 2012
- Rahadja, Prathama dan Manurung, Mandala, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, FEUI, Jakarta, 2004.
- Rahman, Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terjemah Surojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ritonga, *Pelajaran Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Setyawati, Endang, *Ekonomi Makro Pengantar*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Sholhudin M, *Lembaga Keuangan Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Warsito, S. Wojo, *Kamus Umum Lengkap (Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris)*, Alumni, Bandung.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2005.
- Yuliadi, Imanudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, LPPI, Yogyakarta, 2001.